



Langgar Gencatan Senjata, Israel Bombardir Lebanon

Medan, MIMBAR - Israel kembali berulah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan aksi militer mereka membombardir wilayah selatan Lebanon pada Sabtu (20/6).
Padahal, para pejabat dan diplomat dari Amerika Serikat dan negara-negara Teluk secara terpisah mengumumkan gencatan senjata baru antara Israel dan Lebanon pada Jumat (19/6). Gencatan itu berlaku efektif mulai pukul 16.00 waktu setempat.
Meski sudah ada gencatan senjata, dilaporkan setidaknya 12 serangan udara Israel dan penembakan artileri terus-menerus menghantam Lebanon selatan.

Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) juga melaporkan serangan pesawat tak berawak Israel yang menewaskan dua orang saat mengendarai sepeda motor di Lebanon selatan, setelah gencatan senjata diberlakukan.
Seorang diplomat negara Teluk mengatakan Israel dan Hizbullah telah sepakat untuk menghentikan serangan. Dia mengatakan gencatan

■ Bersambung ke Hal 7

Imbas Tekanan Global 4 Perusahaan Besar Terancam PHK Massal



Bolivia Darurat Nasional Negara Didemo Berminggu-minggu

Medan, MIMBAR - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan darurat nasional di negaranya pada Sabtu (20/6) waktu setempat.
Status tersebut ditetapkan karena aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama beberapa pekan lalu, dikutip dari AFP.
Para pengunjung rasa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membuat ekonomi Bolivia

■ Bersambung ke Hal 7

Jadwal

Salat

6 MUHARRAM 1448

Imlak	: 04:45 WIB	Ashar	: 15:56 WIB
Subuh	: 04:55 WIB	Maghrib	: 18:39 WIB
Zuhur	: 12:29 WIB	Isya	: 19:55 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Kurikulum Berbasis Cinta

Oleh: Dr. A. Rasyid, MA

Gagasan penerapan kurikulum berbasis cinta di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PT-KIN) merupakan langkah strategis sekaligus relevan dengan tantangan pendidikan tinggi dewasa ini. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kompetisi global, dan krisis moral yang semakin nyata, pendidikan tinggi tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata. Perguruan tinggi dituntut untuk menghadirkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Dalam konteks itulah, kurikulum berbasis cinta yang digagas dan didorong oleh Kementerian Agama RI menjadi sangat penting.

■ Bersambung ke Hal 7



Kasus Kuota Haji Yaqut Siap Jalani Persidangan

Jakarta, MIMBAR - Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan siap dilimpahkan KPK ke pengadilan kapan saja.
Hal itu disampaikan Yaqut di sela jeda pemeriksaannya pada hari ini.
"Siap," ujar mantan Menteri Agama RI periode 2019-2024 itu menjawab awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/6).
Pada hari ini, Yaqut menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terduga lainnya. Saat ini dia sedang menjalani masa penahanan 30 hari terakhir.
"Pemeriksaan YCQ [Yaqut Cholil

■ Bersambung ke Hal 7

Jakarta, MIMBAR - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya empat perusahaan berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi itu disebut menjadi tanda sektor industri sedang tidak baik-baik saja.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan tekanan muncul akibat kombinasi pelemahan permintaan ekspor, lonjakan biaya bahan baku impor, fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, hingga dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Menurutnya, perusahaan yang paling terdampak adalah perusahaan berorientasi ekspor, seperti sepatu dan garmen,

■ Bersambung ke Hal 7

Kemenhaj: Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

Jakarta, MIMBAR - Kementerian Haji dan Umrah menemukan bahwa banyak jamaah haji yang terjebak utang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak, Minggu (21/6).
Dahnil menceritakan hal itu usai berkunjung ke rumah salah satu Jamaah Haji 2026 di Serdang Bedagai.

■ Bersambung ke Hal 7

Sebanyak 59,9% Warga Gagap Hadapi Ekonomi Memburuk Tak Siap Karena Tak Punya Dana Darurat

Jakarta, MIMBAR - Masyarakat dinilai menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk pada kuartal II-2026 ini. Hal tersebut tergambarkan dalam temuan Survei Litbang Kompas terkait Kondisi Ekonomi yang dilakukan pada April lalu --laman kompas.com dikutip Ahad 21/6.
Survei ini menunjukkan responden menilai ekonomi Indonesia saat ini berada di dalam kondisi buruk dengan persentase 47,3% pada April 2026. Bahkan sebanyak 8,9% responden

bahkan mengkategorikan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk. Hanya sebanyak 37,5% responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai baik -- sebagaimana sering menjadi statemen pemerintah. Hal tersebut juga tergambarkan dalam tingkat pendapatan masyarakat yang urung mengalami peningkatan.
Sebanyak 39,7% responden mengaku tidak mengalami peningkatan pendapatan.
Di sisi lain, sebanyak 30,5% responden justru

mengaku pendapatan turun karena iklim usaha yang melambat. Sekurang-kurangnya, hanya terdapat 5,9% responden saja yang mengaku mengalami peningkatan gaji atau upah. Sebanyak 6,4% responden mengaku mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan usahanya bertambah.

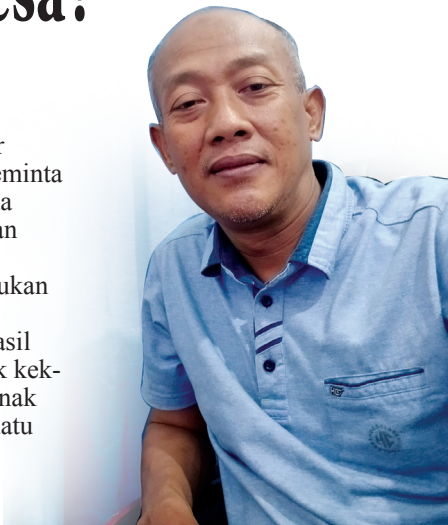
■ Bersambung ke Hal 7

Jalan Desa atau Koperasi Desa?

Oleh: Masrin

Beberapa tahun terakhir, satu hal yang paling sering saya dengar ketika berkunjung ke desa adalah soal pembangunan. Ada yang meminta jalan gang diperbaiki. Ada yang mengeluhkan saluran drainase. Ada yang berharap irigasi diperbaiki. Ada pula yang menunggu jembatan yang belum kunjung selesai.
Semua itu wajar. Karena bagi masyarakat desa, pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan.
Pembangunan adalah jalan yang bisa dilalui ketika membawa hasil panen. Pembangunan adalah saluran air yang membuat sawah tidak kekeringan. Pembangunan adalah jembatan yang memudahkan anak-anak pergi ke sekolah. Dengan kata lain, pembangunan desa adalah sesuatu

■ Bersambung ke Hal 7



KORAN

MIMBAR UMUM

HARGA BARU

BERLANGGANAN KORAN

1 BULAN	= Rp. 20.000
12 BULAN	= Rp. 120.000

TERSEDIA DI

myedisi reader

BISA DOWNLOAD APLIKASI DI

Google Play

App Store



- Semakin terpuruk ...
- Ckckck ...

4 Perusahaan Besar Terancam PHK Massal

Dari Halaman 1

serta perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

"Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang tidak kunjung berhenti dan ada ketidakpastian harga minyak dunia, itu sangat mempengaruhi produksi dari perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh, Minggu (21/6).

Said menjelaskan ia telah melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan industri untuk memetakan potensi PHK. Kunjungan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Guru.

"Ada beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya menemukan beberapa kasus yang harus segera diambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya.

1. PT Pakerin Mojokerto

Perusahaan pertama yang disorot KSPI adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur. Said menyebut perusahaan pengolahan bubur kayu untuk produksi kertas itu berpotensi melakukan PHK.

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," kata Said.

Menurut Said, sebagian besar operasional perusahaan sudah berhenti. Ia menyebut hanya sekitar seperlima bagian pabrik yang masih berjalan, sementara sekitar 80 persen lainnya tidak lagi beroperasi.

2. PT Feng Tay Bandung

Temuan kedua berada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung. Ia mengatakan total pekerja perusahaan itu diperkirakan mencapai 14 ribu hingga 17 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 pekerja disebut sudah dirumahkan, meski belum resmi di-PHK.

"Orderan sepatu (salah satu merk sepatu) ke PT Feng Tay sudah selesai. Sehingga menunggu orderan berikutnya, belum ada kepastian," ujar Said.

KSPI berencana mendatangi langsung PT Feng Tay pada Senin (22/6) bersama perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, dan serikat buruh.

Ia juga menyoroti informasi bahwa pekerja yang dirumahkan hanya menerima 50 persen upah. Said menilai hal itu perlu diperiksa karena perusahaan-perusahaan pemasok merek global biasanya terikat kode etik kerja.

3. Dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur (Inisial J dan S)

Selain dua kasus tersebut, Said juga menyec-

but ada dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, yang berpotensi terdampak PHK. Ia belum menyebut nama perusahaan secara lengkap, tetapi menyebut ribuan pekerja bisa terdampak.

Menurut Said, potensi PHK muncul karena prinsipal dari Jepang mempertimbangkan pemindahan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah perubahan arah industri menuju mobil listrik.

"Situasi perang yang tidak menentu membuat prinsipal akan memindahkan ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya," jelas Said.

4. PT Amos di Cilincing

Said juga menyinggung PT Amos, perusahaan garmen di Cilincing, Jakarta. Menurutny, persoalan di perusahaan tersebut mulai menemukan titik terang setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menyebut pekerja di perusahaan itu sempat tidak memiliki kejelasan status selama berbulan-bulan. Selain itu, gaji belum dibayar dan BPJS sempat bermasalah.

Namun, Said mengatakan kasus PT Amos menjadi contoh bahwa mitigasi bisa dilakukan cepat jika pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan duduk bersama. **(cnni/js)**

Yaqut Siap Jalani

Dari Halaman 1

Qoumas] hari ini dalam kapasitas sebagai saksi untuk menerangkan terkait PMH (Perbuatan Melawan Hukum) tersangka lainnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi melalui pesan tertulis.

Para tersangka lain yang diproses hukum oleh KPK yaitu Staf Khusus Yaqut yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK menyatakan akan melimpahkan berkas perkara para tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam waktu yang bersamaan.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah mengidentifikasi lebih dari 300-an biro travel terlibat dalam kuota haji tambahan. Ada sejumlah biro travel yang ragu memberikan keterangan terkait praktik jual beli kuota haji tambahan. **(cnni/js)**

Bolivia Darurat

Dari Halaman 1

terpuruk. Mereka juga mendesak Presiden Paz mundur dari jabatannya.

Aksi demo tersebut mengakibatkan kekacauan dan membuat sejumlah kota lumpuh karena memblokir jalan-jalan dan melakukan pembakaran.

Paz kemudian mengumumkan status darurat nasional untuk Bolivia akibat chaos di negaranya.

"Setelah menempuh semua jalur dialog, mencapai kesepakatan dengan mereka yang tuntutannya sah, dan mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan dalam upaya untuk menggoyahkan Bolivia, kami memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," kata Paz dalam pidato yang disiarkan televisi.

Demo Sebulan Lebih

Demo di Bolivia sebetulnya sudah berlangsung sejak bulan lalu. Kemarahan warga kian memuncak usai Paz menandatangani undang-undang yang mempermudah pemerintah menerapkan keadaan darurat.

"Undang-undang ini bertujuan melindungi mayoritas penduduk negara ini dari terorisme narkoba yang memicu protes," kata Paz usai meneken UU pada Senin (8/6), dikutip dari ABC News. **(cnni/js)**



Kurikulum Berbasis Cinta

Dari Halaman 1

Selama ini, keberhasilan pendidikan sering kali diukur dari aspek kognitif: indeks prestasi, akreditasi, publikasi ilmiah, hingga capaian kompetensi lulusan. Ukuran-ukuran tersebut memang penting, tetapi tidak cukup. Banyak fenomena sosial menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan moral. Kasus intoleransi, perundungan, kekerasan, ujaran kebencian di media sosial, hingga praktik korupsi yang melibatkan kalangan terdidik menjadi bukti bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter.

Di sinilah kurikulum berbasis cinta menemukan relevansinya.

Kurikulum ini menempatkan nilai kasih sayang, empati, penghargaan terhadap martabat manusia, toleransi, dan kepedulian sosial sebagai ruh dalam seluruh proses pendidikan. Cinta dalam konteks ini bukanlah konsep yang sentimental, melainkan sebuah paradigma pendidikan yang memandang setiap peserta didik sebagai manusia utuh yang harus dikembangkan potensi intelektual, spiritual, emosional, dan sosialnya secara seimbang.

Bagi PTKIN, penerapan kurikulum berbasis cinta sesungguhnya bukan sesuatu yang asing. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi inti ajaran Islam. Al-Qur'an menggambarkan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmatan lil 'alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Artinya, pendidikan Islam sejatinya harus melahirkan insan yang membawa kemaslahatan, kedamaian, dan kasih sayang bagi sesama.

Kebijakan Kementerian Agama untuk mendorong implementasi kurikulum berbasis cinta di PTKIN patut diapresiasi. Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum untuk mereorientasi pendidikan Islam dari yang semata-mata berfokus pada transfer pengetahuan menuju transformasi kepribadian.

Namun, implementasi kurikulum berbasis cinta tidak boleh berhenti pada tataran slogan atau sekadar dokumen administratif. Tantangan terbesar justru terletak pada praksis pembelajaran di kelas. Dosen harus menjadi aktor utama dalam menghidupkan nilai-nilai cinta tersebut.

Seorang dosen tidak cukup hanya menguasai materi perkuliahan. Ia juga harus menjadi teladan moral, membangun komunikasi yang humanis, menghargai keberagaman pandangan mahasiswa, serta menciptakan suasana akademik yang inklusif. Mahasiswa perlu diperlakukan sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek yang menerima informasi.

Desain kurikulum di PTKIN perlu mengintegrasikan nilai-nilai cinta ke dalam capaian pembelajaran lulusan, strategi pembelajaran, maupun sistem evaluasi. Mata kuliah tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, moderasi beragama, dan kemampuan hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk.

PTKIN juga perlu membangun budaya akademik yang ramah dan inklusif. Kampus harus menjadi ruang dialog, bukan arena polarisasi. Perbedaan pandangan harus dipandang sebagai kekayaan intelektual, bukan ancaman. Dengan demikian, kampus dapat berfungsi sebagai laboratorium perdamaian dan toleransi.

Kurikulum berbasis cinta memiliki potensi besar dalam memperkuat agenda moderasi beragama yang selama ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Melalui pendidikan yang menekankan kasih sayang dan penghormatan terhadap kemanusiaan, PTKIN dapat melahirkan generasi Muslim yang moderat, terbuka, dan mampu hidup harmonis di tengah masyarakat plural.

Keberhasilan kurikulum berbasis cinta di PTKIN tidak hanya diukur dari perubahan dokumen kurikulum, melainkan dari lahirnya lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian terhadap sesama.

Jika pendidikan tinggi Islam mampu melahirkan generasi seperti itu, maka PTKIN tidak hanya berhasil menjalankan fungsi akademiknya, tetapi juga meneguhkan kembali misi besar pendidikan Islam: membangun peradaban yang berkeadaban, damai, dan penuh kasih sayang.

Langgar Gencatan Senjata, Israel Bombardir

Dari Halaman 1

bertujuan untuk menghentikan eskalasi di Lebanon, agar tidak menggagalkan upaya yang lebih luas untuk mengubah kesepakatan sementara AS dan Iran, menjadi kesepakatan perdamaian regional yang langgeng.

Seorang pejabat Hizbullah mengatakan, gencatan senjata hanya akan berlaku jika Israel mematuhiinya. Hal serupa juga dilontarkan Israel.

"Israel tetap berkomitmen teguh pada gen-

catan senjata segera. Jika Hizbullah menghormati perjanjian dan menghentikan permusuhan, mereka akan disambut dengan tenang," kata Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter.

Namun serangan Israel tetap berlanjut, hingga membuat warga di Lebanon selatan mempertanyakan apakah gencatan senjata itu benar-benar berlaku.

"Rasanya tidak seperti gencatan senjata. Sebaliknya ada perasaan deja vu. Setiap kali gencatan senjata diumumkan, kita melihat peningkatan aktivitas militer di lapangan," demikian laporan jurnalis Al Jazeera Heidi Pett.

Sebanyak 59,9% Warga Gagap Hadapi Ekonomi

Dari Halaman 1

Ekonomi tersebut, menunjukkan sebanyak 59,9% --atau hampir 6 dari 10 responden-- mengaku belum siap alias gagap menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk di sisa 2026 ini.

Mereka yang gagap tersebut karena sama sekali tidak memiliki tabungan atau dana darurat.

MEMBURUK DARI AWAL TAHUN

Peneliti Litbang Kompas, Budiawan Sidik Ariefanto, mengatakan, sekitar 56% responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk. "Bahkan, jika dibandingkan dengan survei serupa pada awal tahun ini, kondisinya justru kian memburuk," kata dia.

Ia menjelaskan, pada survei serupa pada Januari 2026, responden yang menilai kondisi buruk itu masih di kisaran 46%. Kendati demikian, tiga bulan berselang, jumlah responden yang merasakan situasi tersebut melonjak sekitar 10%.

Budiawan mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menggambarkan situasi saat ini memang tidak sebaik awal tahun. Indikasinya terlihat dari pengakuan responden yang menyatakan adanya perubahan tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Pada survei Januari 2026, jumlah responden yang menyatakan penghasilannya menurun ada sekitar 25%. Jumlah itu terdiri dari 2,4% penurunan pendapatan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 23,2% lainnya karena usaha yang melambat.

Pada survei April lalu, jumlah masyarakat yang menyatakan penghasilannya susut melonjak menjadi 32,5%. Secara rinci, hampir 2% karena terkena PHK, dan 30-an persen lainnya karena usaha lesu.

"Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomi-

mian relatif melambat sehingga turut berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara luas," ungkap dia.

TAK PUNYA DANA DARURAT

Survei Litbang Kompas terkait Kondisi Ekonomi tersebut juga menunjukkan sebanyak 59,9% responden mengaku belum siap jika menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk di sisa 2026 ini. Jumlah tersebut tidak siap karena tidak memiliki tabungan atau dana darurat.

Hanya sejumlah 37,1% nasabah yang mengaku siap menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk karena memiliki tabungan dan dana darurat.

Secara lebih rinci, sebanyak 47,7% responden mengaku saat ini kondisi ekonomi keluarga berada di kondisi yang tidak menentu (unsettled). Lalu, sebanyak 28,1% responden mengaku memiliki kondisi ekonomi keluarga yang terkendali (calm).

Dari jumlah responden tersebut hanya sebanyak 14,6% yang mengaku memiliki keluarga dengan kondisi ekonomi yang kokok terjaga (stable)

KESAKSIAN

Kompas melansir kesaksian beberapa responden. Seorang karyawan swasta bernama Jenny (25), menganggap situasi ekonomi Indonesia saat ini bisa disebut buruk. Pasalnya, kenaikan harga bensin subsidi terutama Pertamina membuat sedikit panik.

"Kan berdampak ke pembelian BBM harian, terus harga-harga lainnya juga nanti takutnya naik," kata dia, Rabu (17/6).

Padahal, awal mula ia berpindah menggunakan Pertamina karena merasa kondisi ekonomi pribadi mulai membaik dan ingin mengurangi beban negara. Kendati demikian, kenaikan harga kali ini justru terasa membebani pengeluaran bulannya. Sebagai seorang perantau, kondisi ekonomi saat ini juga dirasa kian buruk dilihat dari harga tiket

pesawat yang semakin tinggi.

"Harga tiket pesawat sampai dua kali lipat, jadi kalau mau pulang kampung berpikir 10 kali, kalau mau healing juga jadi ngerem karena (harga tiket) tidak masuk akal," ucap dia.

Sementara itu, seorang pegawai swasta bernama Amara (25) menceritakan, kondisi ekonomi memang terlihat lebih sulit dibandingkan dengan tahun lalu. "Keliatannya lebih susah, tidak yang buruk banget dampaknya ke aku," ucap dia.

Kendati demikian, ia mengungkapkan, kondisi ekonomi saat ini memang terasa lebih memburuk dibandingkan awal tahun.

KHAWATIR KENAikan BAHAN POKOK

Survei Litbang Kompas terkait Ekonomi melaporkan, sebanyak 39,1% responden mengaku kenaikan bahan pokok menjadi kekhawatiran utama hingga akhir tahun nanti. Kemudian, sebanyak 12,9% responden juga khawatir terjadi penurunan pada pendapatan usaha dan gaji.

Sedangkan, 10% responden mengatakan khawatir kehilangan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan akhir tahun nanti. Pasalnya, sebanyak 61,8% responden mengaku saat ini menjadi periode yang sulit untuk mencari kerja di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan 16,1% responden mengaku sangat sulit mendapatkan pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya saat ini.

Dilaporkan, metode penelitian Litbang Kompas ini dilakukan dengan survei melalui wawancara tatap muka pada 16-22 April 2026 terhadap 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, dan margin of error penelitian kurang lebih 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. **(kps/js)**

Kemenhaj: Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

Dari Halaman 1

"Nek Sania (72 thn) namanya. Beliau janda, dan tinggal menumpang di rumah anaknya di Serang Bedagai," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Dahnil, Nek Sania adalah jamaah haji yang berangkat haji tahun 2026, beliau adalah buruh cuci.

Jalan Desa atau Koperasi Desa?

Dari Halaman 1

yang langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu saya mulai berpikir ketika mendengar bahwa Dana Desa kini dapat digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Saya tidak sedang mempersoalkan koperasinya. Saya hanya mencoba memahami pilihan yang sedang dibuat.

Bahwa setiap kebijakan pada dasarnya adalah soal memilih. Ketika satu rupiah digunakan untuk satu program, maka rupiah yang sama tidak bisa digunakan untuk program yang lain. Itulah kenyataan yang tidak bisa dihindari.

Dana Desa juga demikian. Jumlahnya terbatas. Kebutuhannya banyak. Karena itu setiap rupiah yang keluar seharusnya benar-benar dipertimbangkan manfaatnya.

Saya lalu membayangkan sebuah desa. Di sana masih ada jalan lingkungan yang rusak. Ada gang-gang yang masih licin berlumpur Ketika datang hujan. Ada drainase yang belum memadai sehingga kerap air menggenang di sana. Ada irigasi yang perlu diperbaiki. Ada kelompok tani

yang membutuhkan dukungan. Ada berbagai kebutuhan yang selama ini menjadi bagian dari pembangunan desa.

Lalu sebagian perhatian dan sumber daya desa mulai diarahkan kepada Koperasi Merah Putih.

Pertanyaannya sederhana. Apakah itu pilihan yang paling mendesak?

Saya tidak memiliki jawaban yang pasti. Karena setiap desa tentu memiliki kondisi yang berbeda.

Tetapi pertanyaan itu tetap layak diajukan. Sebab Dana Desa sejak awal lahir untuk memperkuat desa.

Bukan sekadar memperbanyak program. Bukan sekadar mengejar target. Melainkan membantu desa menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Di sinilah saya melihat pentingnya mendengar suara masyarakat. Karena yang mengetahui kebutuhan desa bukanlah orang yang duduk di kantor yang jauh dari desa. Yang paling mengetahui kebutuhan desa adalah masyarakat desa itu sendiri. Mereka yang setiap hari melewati jalan yang rusak. Mereka yang setiap musim kemarau menghadapi persoalan irigasi. Mereka

yang merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan pembangunan.

Karena itu menurut saya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Koperasi Merah Putih baik atau buruk.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah Koperasi Merah Putih merupakan kebutuhan paling mendesak bagi desa saat ini?

Jika jawabannya ya, tentu masyarakat akan mendukung. Tetapi jika masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak, maka masyarakat juga berhak bertanya. Mengapa prioritasnya harus ke sana?

Pada akhirnya pembangunan selalu soal pilihan. Dan setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi. Membangun satu hal sering kali berarti menunda hal yang lain. Karena itu sebelum memutuskan ke mana Dana Desa akan diarahkan, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu dijawab terlebih dahulu. Jika harus memilih, mana yang lebih dulu dibutuhkan warga? Jalan desa yang lebih baik?

Atau koperasi desa yang lebih banyak?

Karena jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan menentukan arah pembangunan desa kita dalam beberapa tahun ke depan.